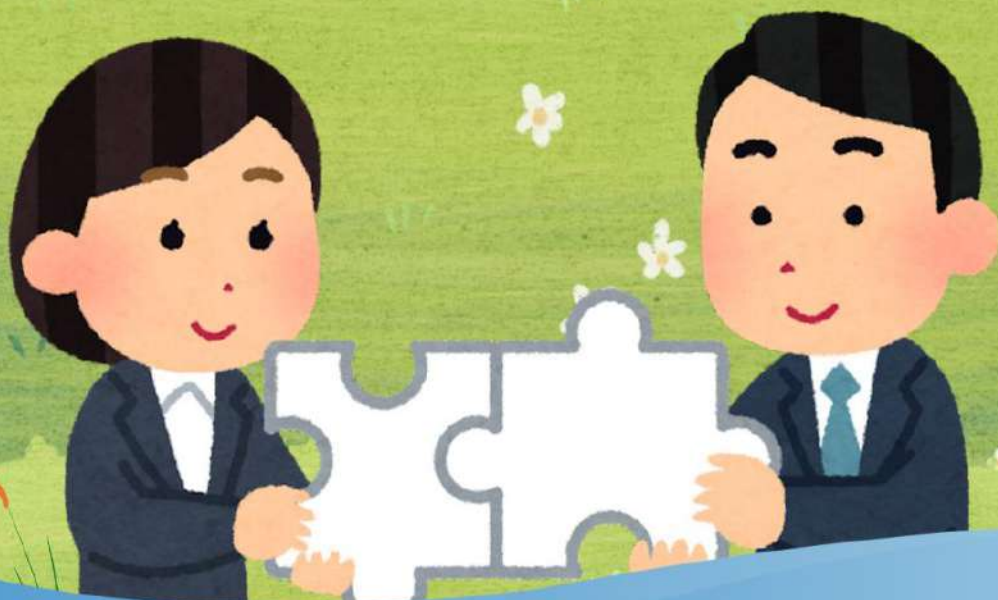




# RENCANA KERJA TAHUN 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS SOSIAL**

**Jl. A. Yani No. 38 Blitar**



website : [www.dinsos.blitarkab.go.id](http://www.dinsos.blitarkab.go.id)



email : [dinsos@blitarkab.go.id](mailto:dinsos@blitarkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Nikmat, Rahmat, dan Taufik-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini dengan baik.

RENJA Dinas Sosial tahun 2026 merupakan kesinambungan gerak langkah Dinas Sosial dalam mewujudkan Visi, Misi, dan sasaran program sosial yang telah dituangkan dalam RENSTRA Dinas Sosial. RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun atas dasar RENSTRA Dinas Sosial, serta isu terkini program sosial pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar ini, diharapkan seluruh bidang dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya dan tenaga dalam menyusun RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kemajuan Dinas Sosial guna menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Blitar, 29 Agustus 2025  
KEPALA DINAS SOSIAL

**Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670929 199202 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	78
3.3 Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92
BAB V PENUTUP	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025 Kabupaten Blitar	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Blitar	42
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Blitar	54
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Blitar	69
Tabel 3.1	Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Kemensos RI 2025-2029	77
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	80
Tabel 4.1	Rencana Pemenuhan SPM Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 berlandaskan pada Surat Edaran Bupati Blitar Nomor B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan tahunan.

Secara normatif, penyusunan RENJA Dinas Sosial ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perangkat daerah merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD).

Selain itu, penyusunan RENJA ini juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta tanggap terhadap perubahan. Perencanaan tersebut dilaksanakan melalui jenjang perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Di tingkat daerah, penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 juga berlandaskan pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator, dan target kinerja, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Dokumen

ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan internal Dinas Sosial, tetapi juga bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar secara keseluruhan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai PD pelayanan kesejahteraan sosial memiliki tugas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai karakteristik organisasi yang cukup kompleks didukung dengan berbagai jenis tenaga teknis dan keilmuan yang berintegrasi satu sama lain. Kualitas pelayanan perlu didukung dengan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Hal tersebut mengakibatkan kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seyogyanya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan biaya operasional yang cukup besar, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup berkesinambungan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, DBHCHT, dan sumber pendanaan lainnya.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Sosial yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 782);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 101/D); dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 73/E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2026 adalah:

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan tahunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. RENJA ini menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial.

## 2. Tujuan

- 1) Menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2026 ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial.
- 2) Menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, fakir miskin, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 3) Menyediakan dasar perencanaan anggaran tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
- 4) Menjamin keterpaduan antara perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.
- 5) Menjadi instrumen pengukuran, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- 6) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sosial yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar

### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Relaisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah seperti di bawah ini yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing selaras dengan inputan Evaluasi RKPD Tahun 2024, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel ..... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun .... (tahun berjalan)  
 Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama SKPD : ..... Lembar ..... dari .....

Kode	Urutan/Bidang Urutan Pencerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun ...	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Rencana Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Rencana Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9+7*9)	11=(10/4)
	Urusan ...									
1	Bidang Urusan ...									
1 01	Program ...									
1 01 01	Kegiatan ...									
1 01 01 02	Kegiatan ...									
1 01 01 03	Det ...									
1 01 01	Program ...									
1 01 01 01	kegiatan ...									
1 01 01 02	Kegiatan ...									
1 01 01 03	Det ...									
1 01 01	Program ...									
1 01 01 01	Kegiatan ...									
1 01 01 02	Kegiatan ...									
1 01 01 03	Det ...									

..... 20 ..  
 Kepala Perangkat Daerah \*)  
 .....

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja indikator kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Tabel ..... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD .....

Provinsi/Kabupaten/Kota .....

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	Tahun ... (thn n-2)	Tahun ... (thn n-1)	Tahun ... (thn n)	Tahun ... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Pejelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut:

Tabel ..... (nomor disesuaikan kebutuhan)  
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun .....  
 Provinsi/Kabupaten/kota .....

Nama SKPD : .....

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, pokok pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. Sajikan Tabel sebagai berikut:

Tabel ..... (nomor disesuaikan kebutuhan)  
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun .....  
 Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Nama SKPD : .....

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

#### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana Tindak Lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2024.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar meliputi 6 (enam) hal, yaitu : (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (b) realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (d) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; (e) implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan (f) kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024 Kabupaten Blitar:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025**  
**Kabupaten Blitar**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06	Dinas Sosial									
1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,89%	n(A)	n(A)	n(A)	n(A)	83,29%	80%	96%
1.06.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	19 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	8 Dokumen	5 Dokumen	63%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	11 Laporan	8 Laporan	73%
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	n/A	n/A	n/A	n/A	1 Dokumen	n/A	n/A
1.06.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	n/A	n/A	n/A	n/A	100 Data	n/A	n/A
1.06.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	32 Orang/bulan	38 Orang/bulan	30 Orang/bulan	84%	38 Orang/bulan	33 Orang/bulan	94%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standar	100%	n/A	n/A	n/A	n/A	100%	n/A	n/A
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 orang	n/A	n/A	n/A	n/A	26 orang	n/A	n/A
1.06.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	n/A	n/A	n/A	n/A	40 orang	n/A	n/A
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	100%	48 laporan	48 laporan	100%
1.06.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	n/A	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.06.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>50 Unit</i>	<i>50 Unit</i>	<i>50 Unit</i>	<i>50 Unit</i>	<i>100%</i>	<i>50 Unit</i>	<i>50 Unit</i>	<i>100%</i>
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	50 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi</i>	5 Jasa	5 Jasa	5 Jasa	5 Jasa	100%	5 Jasa	5 Jasa	100%
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303 laporan	550 laporan	550 laporan	550 laporan	100%	380 laporan	493 laporan	163%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	15 laporan	15 laporan	14 laporan	93%	12 laporan	14 laporan	117%
1.06.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i>	77 Unit	77 Unit	77 Unit	77 Unit	100%	77 Unit	77 Unit	100%
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	26 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial</b>	<b>24,43%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>191%</b>	<b>191%</b>	<b>24,21%</b>	<b>102%</b>	<b>4%</b>
1.06.02.2.02	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>13 Rekomendasi</i>	<i>75 Rekomendasi</i>	<i>50 Rekomendasi</i>	<i>67%</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>21 Rekomendasi</i>	<i>21%</i>

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.02.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 dokumen	13 dokumen	75 dokumen	50 dokumen	67%	1 dokumen	21 dokumen	21%
1.06.02.2.03	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i>	100%	100%	100%	91%	91%	100%	97%	97%
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	n(A)	22 orang	22 orang	22 orang	100%	n(A)	31 orang	n(A)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	n(A)	22 orang	22 orang	22 orang	100%	n(A)	22 orang	n(A)

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 lembaga	27 lembaga	31 lembaga	31 lembaga	100%	38 lembaga	32 lembaga	89%
1.06.02.2.03.012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	17 orang	17 orang	8 orang	47%	3 orang	9 orang	300%
1.06.02.2.03.014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja	72 orang	n/A	n/A	n/A	n/A	72 orang	n/A	n/A

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya								
1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</b>	n/A	0%	100%	1%	1%	n/A	33%	33%
1.06.03.2.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal</i>	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</i>	n/A	0%	100%	1%	1%	n/A	33%	33%
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak	n/A	0 orang	100 orang	1 orang	1%	n/A	1 orang	1%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	39,71%	100%	100%	163%	163%	39,83%	101%	254%
1.06.04.2.01	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar</i>	<i>1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</i>	n/A	100%	100%	100%	100%	n/A	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	<i>Panti Sosial</i>									
		<i>2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	85 orang	200 orang	1.082 orang	541%	200 orang	456 orang	228%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	35 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	32 orang	107%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat	Jumlah Orang yang	50 orang	0 orang	177 orang	177 orang	100%	50 orang	76 orang	152%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Bantu	Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	30 orang	40 orang	50 orang	125%	100 orang	60 orang	60%
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	9 orang	10 orang	9 orang	90%	10 orang	9 orang	90%
1.06.04.2.01.10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	33 orang	20 orang	31 orang	155%	100 orang	55 orang	55%
1.06.04.2.01.12	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20 orang	20 orang	11 orang	55%	50 orang	27 orang	54%
1.06.04.2.02.014	Fasilitasi Pembuatan	Jumlah Orang yang	5 orang	0 orang	5 orang	3 orang	60%	5 orang	3 orang	60%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	100%	4 Jenis Layanan	4 Jenis Layanan	100%
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar	100 orang	294 orang	100 orang	119 orang	119%	100 orang	171 orang	171%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	20 orang	100 orang	77 keluarga	77%	100 orang	66 orang	88%
1.06.04.2.02.12	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	31 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	43 orang	15 orang	27 orang	180%	30 orang	33 orang	110%
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	n/A	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	n/A	1 dokumen	n/A

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	78,07%	n(A)	n(A)	n(A)	n(A)	78,09%	78,05%	100%
1.06.05.2.02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang Divalidasi dan Diverifikasi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	113.551 orang	562.076 orang	562.076 orang	562.076 orang	100%	113.551 orang	412.567 orang	363%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	8.125 keluarga	9.600 keluarga	9.600 keluarga	9.600 keluarga	100%	8.125 keluarga	9.108 keluarga	112%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	60 orang	50 orang	60 orang	120%	50 orang	57 orang	113%
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>87,7%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>
1.06.06.2.01	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana</i>	<i>100%</i>	<i>10%</i>	<i>100%</i>	<i>34%</i>	<i>34%</i>	<i>100%</i>	<i>48%</i>	<i>48%</i>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan	1.000 orang	101 orang	1.000 orang	250 orang	25%	1.000 orang	450 orang	45%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkn Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	0 orang	100 orang	48 orang	48%	20 orang	23 orang	115%
1.06.06.2.01.04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	0 orang	100 orang	48 orang	48%	20 orang	23 orang	115%
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	0 orang	100 orang	14 orang	14%	100 orang	38 orang	38%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2027)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
1.06.06.2.02	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang Terbentuk</i>	40%	100%	40%	47%	118%	40%	63%	158%
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kampung	10 kampung	4 kampung	10 kampung	250%	10 kampung	10 kampung	100%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	44 orang	48 orang	44 orang	48 orang	109%	44 orang	47 orang	107%

## **1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan.**

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tetapi masih ada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum mencapai target di antaranya:

**a. Program Pemberdayaan Sosial.** Terdapat beberapa 2 (dua) yang tidak tercapai targetnya diantaranya adalah:

### **▪ *Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.***

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang masih belum mencapai target yaitu masih tercapai 50 dokumen atau 67%.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya jumlah permohonan izin dan pelaporan kegiatan undian gratis berhadiah maupun pengumpulan uang atau barang dari masyarakat, lembaga, dan organisasi sosial selama tahun berjalan. Banyak kegiatan serupa yang diselenggarakan tanpa melalui proses koordinasi resmi dengan Dinas Sosial, baik karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perizinan maupun karena kegiatan dilakukan dalam skala kecil dan bersifat internal lembaga.

Faktor lainnya adalah minimnya sosialisasi dan publikasi mengenai tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang sesuai dengan ketentuan Permensos, sehingga belum semua pihak memahami pentingnya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Sosial.

### **▪ *Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.***

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan indikator kinerja jumlah sumber daya manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus kewenangan kabupaten/kota juga belum mencapai target yaitu masih 8 orang atau 47%.

Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah SDM pendamping dan pengurus LK3 aktif di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan belum

optimal. Di sisi lain, kegiatan fasilitasi dan pendampingan kasus LK3 lebih difokuskan pada penanganan kasus prioritas, sehingga kegiatan peningkatan kapasitas tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai target perencanaan.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.** Pada *Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal*, terdapat satu sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya yaitu Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten Asal dengan indikator jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu hanya mencapai 1 orang atau 1% karena berdasarkan laporan dari wilayah baik desa/kelurahan maupun Disnaker selaku leading sektor bahwa pemulangan PMI bermasalah sosial psikologis di tahun 2024 dari pemerintah pusat hanya 1 orang.
- c. Program Rehabilitasi Sosial.** Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya diantaranya sebagai berikut:
- *Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.*
    - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan indikator kinerja jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 9 orang atau 90% karena jumlah klien yang membutuhkan fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar berdasarkan hasil asesmen sosial di lapangan memang tidak sebanyak target awal. Dari total penerima layanan rehabilitasi sosial yang diasesmen, sebagian besar telah memiliki akses layanan dasar secara mandiri, baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, maupun fasilitas kesehatan setempat, sehingga tidak memerlukan fasilitasi tambahan dari pemerintah daerah.
    - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan indikator jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 11 orang atau 55% karena menyesuaikan jumlah PPKS yang ditangani.
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan

Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 3 orang atau 60% karena tidak semua penerima manfaat yang diasesmen memenuhi persyaratan administratif dan data pendukung yang diperlukan untuk proses pembuatan dokumen kependudukan, seperti keterangan asal-usul, dokumen keluarga, atau data domisili yang valid.

▪ ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.***

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 77 orang atau 77% karena keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal akomodasi dan transportasi peserta.

**d. Program Penanganan Bencana.** Terdapat 4 (empat) sub kegiatan yang tidak tercapai targetnya yaitu di antaranya adalah:

▪ ***Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.***

- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan indikator jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 250 orang atau 25% karena menyesuaikan dengan jumlah korban bencana yang ditangani.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan indikator jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 48 orang atau 48% karena menyesuaikan jumlah korban bencana yang membutuhkan sandang.
- Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan indikator jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 48 orang atau 48% karena menyesuaikan jumlah korban bencana yang termasuk kelompok rentan dan membutuhkan bantuan khusus seperti susu, diapers, dll.

- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota masih belum mencapai target yaitu 14 orang atau 14% karena selama periode pelaporan tahun 2024, jumlah kejadian bencana yang menimbulkan dampak psikologis signifikan bagi korban relatif rendah, sehingga jumlah penerima layanan dukungan psikososial pun menjadi lebih sedikit dari perkiraan awal perencanaan.

## **2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Secara umum pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah memenuhi target di antaranya:

### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota**

- *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

### **b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- *Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
- Subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Dearah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

### **c. Program Pemberdayaan Sosial**

- *Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*
- Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

**d. Program Rehabilitasi sosial**

- *Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*
  - Subkegiatan Penyediaan Sandang
  - Subkegiatan Penyediaan Alat Bantu
  - Subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- *Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*
  - Subkegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
  - Subkegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2024, semua kegiatan telah selesai dijalankan. Belanja barang dan jasa yang merupakan belanja rutin seperti Belanja Pegawai, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Honorarium, Belanja Jasa Pengelolaan BMD, Belanja Alat Tulis, Kertas, Bahan Komputer, Alat Listrik, Perabot Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Benda Pos, Belanja Tagihan Telepon, Air, dan Listrik, Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Sewa *Electric Generating Set*, Peralatan Studio Audio, Belanja Hibah, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Sewa Bangunan Gedung, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Non ASN, Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD), Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Isi Tabung Gas, dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana. Kegiatan belanja modal seperti Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Peralatan Studio Video dan Film, Mebel, Alat Pendingin, *Personal Computer*, Peralatan *Personal*

Computer, dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga juga telah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

### **3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Program dan kegiatan Dinas Sosial yang melebihi target kinerja di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Rehabilitasi Sosial**

- ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***

- Subkegiatan Penyediaan Permakanan melebihi target yakni 1.082 orang atau 541%.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penambahan anggaran insentif fiskal sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yangmana sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan berupa paket sembako untuk diserahkan kepada masyarakat dengan target 1.000 orang dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- Subkegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan melebihi target yakni 31 orang atau 155%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kedaruratan sosial yang terjadi selama tahun 2024. Banyak kasus tersebut bersifat mendadak atau insidental dan membutuhkan penanganan segera, sehingga jumlah penerima layanan melebihi target awal perencanaan.

- ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***

- Subkegiatan Penyediaan Permakanan melebihi target yakni 119 orang atau 119%
- Subkegiatan Pemberian Layanan Rujukan melebihi target yakni 27 orang atau 180%

#### **b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- ***Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***

- Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yakni 60 orang atau 120%. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pemberian bantuan sosial kewirausahaan yang diberikan pada suatu kelompok, jumlah kelompok sudah memenuhi target yaitu 5 kelompok akan tetapi jumlah anggota tiap kelompok tidak sama, melihat berdasarkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial jumlah anggota

kelompok yaitu minimal 5 orang maksimal 20 orang. Oleh karena itu, total anggota KUBE yang menerima bantuan menjadi melebihi target.

**c. Program Penanganan Bencana**

- *Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*
- Subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana melebihi target yakni 10 KSB atau sebesar 250%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya komitmen dan antusiasme masyarakat di wilayah rawan bencana untuk membentuk dan mengembangkan KSB secara mandiri, sehingga pelaksanaan kegiatan KSB baik pembentukan maupun perluasan wilayah pada tahun berjalan melampaui target.
- Subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana melebihi target yakni 48 orang atau sebesar 109%. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah anggota Tagana dari awal perencanaan dokumen Renstra yang ditetapkan. Selain itu juga disebabkan oleh tingginya komitmen relawan yang bersifat sukarela tanpa menambah beban biaya kegiatan juga menjadi faktor pendorong utama meningkatnya realisasi capaian.

**4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

**a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target**

Faktor ini biasanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kondisi lapangan, dan dinamika sosial masyarakat.

- 1) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, baik jumlah pekerja sosial, pendamping, maupun relawan (Tagana/LK3) sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal.
- 2) Kurangnya kemampuan/kapasitas atas sumber daya manusia yang sudah ada.
- 3) Kendala administrasi dan koordinasi lintas sektor, misalnya dalam fasilitasi dokumen kependudukan, layanan pendidikan/kesehatan, atau rujukan ke panti.
- 4) Terbatasnya data terkini dan valid penerima manfaat (data DTKS/SIKS-NG) sehingga sasaran kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.
- 5) Perubahan kebijakan atau prioritas penanganan kasus sosial mendesak, misalnya karena adanya bencana, kasus anak, atau lansia terlantar yang harus ditangani segera.

- 6) Keterlambatan penyaluran bantuan sosial karena proses administrasi atau pengadaan barang/jasa.

**b. Faktor Penyebab Terpenuhinya Target**

Menunjukkan kondisi kegiatan berjalan sesuai rencana karena dukungan dan koordinasi yang baik. Beberapa faktor umum di Dinas Sosial antara lain :

- 1) Perencanaan kegiatan yang realistis dan berbasis kebutuhan (berdasarkan asesmen sosial).
- 2) Kinerja petugas lapangan yang responsif dan terkoordinasi, seperti Tagana, TKSK, dan pekerja sosial.
- 3) Koordinasi lintas sektor yang baik antara Dinas Sosial dengan perangkat daerah lain, lembaga sosial masyarakat, instansi vertikal dan pemerintah desa/kelurahan.
- 4) Tersedianya dukungan anggaran dan sarana pendukung kegiatan yang memadai.
- 5) Monitoring dan evaluasi berkala yang memastikan kegiatan tetap sesuai arah kebijakan.

**c. Faktor Penyebab Melebihi Target**

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh dinamika sosial atau bencana yang meningkatkan kebutuhan layanan sosial. Faktor-faktornya di Dinas Sosial meliputi :

- 1) Tambahan anggaran dari insentif fiskal atau sumber lainnya yang memperluas jangkauan sasaran penerima manfaat.
- 2) Meningkatnya kebutuhan sosial dan kasus kedaruratan, sehingga intervensi layanan bertambah dari rencana awal.
- 3) Fleksibilitas pelaksanaan program, terutama pada skema bantuan kelompok dan layanan responsif.
- 4) Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti pembentukan KSB dan Tagana.
- 5) Peran aktif jejaring PSKS dan relawan sosial, yang memperkuat pelaksanaan tanpa tambahan beban anggaran.
- 6) Koordinasi yang efektif lintas sektor dan lintas bidang, mendukung percepatan dan perluasan capaian program.
- 7) Pemanfaatan anggaran dan sumber daya secara adaptif, sehingga mampu merespons kondisi lapangan yang dinamis.
- 8) Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta PMKS cukup banyak dari hasil penjangkauan dan

aduan sehingga melebihi target. Jumlah PMKS tersebut memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar.

## **5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra PD**

Capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial pada tahun berjalan memberikan sejumlah implikasi terhadap pencapaian target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Secara umum, capaian yang telah terpenuhi maupun melebihi target berkontribusi positif terhadap percepatan pencapaian sasaran strategis bidang sosial, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target, sehingga berimplikasi pada perlunya upaya perbaikan dan penyesuaian strategi pelaksanaan di tahun berikutnya. Adapun implikasi yang timbul dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra PD**

Kegiatan yang belum mencapai target, seperti pada layanan dukungan psikososial dan beberapa kegiatan pemberian bantuan sosial, berimplikasi pada perlambatan pencapaian sasaran peningkatan perlindungan sosial dan kualitas hidup kelompok rentan. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat mekanisme perencanaan berbasis data, memperbaiki koordinasi lintas sektor, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai agar target jangka menengah tetap dapat dicapai.

### **b. Terhadap Efektivitas Program dan Kinerja Indikator Utama**

Kegiatan yang melebihi target, seperti pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), menunjukkan adanya potensi percepatan capaian sasaran Renstra pada aspek peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan sosial masyarakat. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa program Dinas Sosial semakin relevan dengan kebutuhan lapangan dan memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

### **c. Terhadap Penyesuaian Rencana Kinerja Tahunan ke Depan**

Perbedaan capaian kinerja antara target dan realisasi memberikan dasar bagi Dinas Sosial untuk melakukan penyesuaian target tahunan pada Renja tahun berikutnya. Program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja rendah akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, validitas data penerima manfaat, dan optimalisasi peran tenaga sosial. Sementara itu, kegiatan yang melebihi target akan diarahkan untuk mempertahankan bahkan memperluas cakupan manfaatnya.

#### **d. Terhadap Keberlanjutan Program Sosial**

Kegiatan yang menunjukkan hasil positif menjadi dasar penguatan program berkelanjutan dalam periode Renstra berikutnya, terutama pada penguatan kapasitas masyarakat melalui KSB, Tagana, serta pemberdayaan kelompok rentan. Sebaliknya, capaian yang masih rendah menjadi evaluasi bagi penyusunan strategi intervensi sosial yang lebih adaptif dan inklusif di masa mendatang.

### **6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut**

Sebagai tindak lanjut atas berbagai faktor penyebab baik terhadap kegiatan yang belum mencapai target, terpenuhi sesuai target, maupun yang melebihi target, maka kebijakan dan langkah perencanaan serta penganggaran yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memutakhirkan data penerima manfaat dan hasil asesmen sosial secara berkala.
- 2) Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta lembaga sosial masyarakat.
- 3) Melakukan pembahasan lebih lanjut bersama sub koordinator keuangan dan bidang-bidang terhadap capaian yang melebihi target kinerja.
- 4) Menetapkan prioritas penggunaan anggaran pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
- 5) Melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan dengan capaian rendah maupun tinggi untuk menjaga konsistensi hasil.
- 6) Menjaga efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas layanan sosial.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Blitar**

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen			9,19	8,61	8,44	8,25	8,76	-	8,44	8,25	
2	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	Persen		√	-	0,15	0,17	0,19	0,37	-	0,17	0,19	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Dapat Memenuhi Kebutuhan	Persen		√	-	4,25	4,30	4,36	4,19	-	4,30	4,36	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya												
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	√		100	100	100	100	100	-	100	100	
5	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	√		100	100	100	100	100	-	100	100	
6	Persentase Lanjut Usia	Persen	√		100	100	100	100	100	-	100	100	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti												
7	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	√		100	100	100	100	100	-	100	100	
8	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah	Persen	√		100	100	100	100	100	-	100	100	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota												

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial menunjukkan hasil yang stabil dan cenderung baik pada sebagian besar indikator yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti sosial. Sebagian besar indikator, khususnya yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), telah mencapai target 100%, menandakan terpenuhinya layanan dasar bagi kelompok rentan sesuai mandat pemerintah daerah.

Namun, beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) masih menunjukkan tren penurunan capaian atau fluktuasi, yang menandakan perlunya penguatan pada aspek perencanaan berbasis data dan efektivitas program pemberdayaan sosial. Berikut analisis per indikator IKK Dinas Sosial periode Renstra 2025-2029:

**a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Tahun 2024 sebesar 8,76% dengan target 9,19%, dan diproyeksikan turun menjadi 8,25% pada tahun 2027. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat akibat peningkatan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial. Selain itu, dipengaruhi oleh penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar, tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar menurun dari 9,69% pada tahun 2023 menjadi 8,16% pada tahun 2024, yang berarti jumlah penduduk miskin sebagai komponen terbesar dari kelompok PPKS turun secara signifikan.

Selain faktor kemiskinan, juga dipengaruhi oleh demografi penduduk (pindah alamat, kelahiran dan kematian), dukungan layanan sosial dasar yang intervensinya preventif dan juga pemutakhiran data PPKS yang dilakukan melalui aplikasi daerah SIDAKSOS sehingga data lebih akurat dan terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga jumlah PPKS yang terdata menjadi lebih realistis dibanding tahun sebelumnya.

**b. Persentase Penurunan Jumlah PPKS**

Realisasi 2024 sebesar 0,37%, melebihi target tahunan 0,15%. Capaian yang melampaui target menunjukkan efektivitas program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk intervensi melalui bantuan sosial, layanan kedaruratan, dan kegiatan berbasis komunitas. Penurunan ini juga sejalan dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi dan meningkatnya jangkauan program nasional seperti PKH, BPNT, dan JKN PBI, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kelompok rentan dan miskin. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa penurunan ini benar-benar menggambarkan peningkatan kondisi sosial ekonomi dan bukan sekedar hasil pergeseran data administrasi.

Meskipun capaian penurunannya cukup besar dari tahun lalu, akan tetapi target tahunan tetap ditetapkan relatif kecil (0,15%) karena komponen terbesar PPKS berasal dari fakir miskin dan kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang sulit diatasi secara cepat, membutuhkan intervensi lintas sektor dan waktu yang panjang. Penetapan target yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan ketidaktercapaian kinerja, mengingat dinamika sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, daya beli, dan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah memilih strategi realistis dengan target moderat namun konsisten menurun, agar capaian dapat dijaga berkelanjutan dan tidak semu akibat fluktuasi data administrasi.

### **c. Persentase PPKS yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosial**

Capaian yang sedikit di bawah target ini mencerminkan bahwa proses pemulihan fungsi sosial bagi PPKS belum sepenuhnya optimal, terutama karena terbatasnya kapasitas layanan rehabilitasi sosial di luar panti, serta belum meratanya distribusi alat bantu sosial dan layanan pendukung lainnya. Selain itu, masih terdapat kendala dalam asesmen kebutuhan dan pendampingan berkelanjutan, yang menyebabkan sebagian penerima manfaat belum sepenuhnya mencapai kemandirian sosial.

Dalam konteks indikator ini, yang dimaksud PPKS dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya bukan hanya sebatas mereka yang memperoleh layanan dari Dinas Sosial atau instansi terkait, tetapi juga mereka yang telah mampu mandiri secara sosial dan ekonomi. Artinya, bagi penerima manfaat yang sebelumnya berada dalam pendampingan kasus, statusnya telah dinyatakan selesai (terminasi) setelah mendapatkan penanganan berkelanjutan dan dinilai sudah mampu menjalankan peran sosial dalam keluarga maupun masyarakat tanpa ketergantungan pada intervensi langsung pemerintah.

Khusus untuk kelompok fakir miskin, capaian indikator ini tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan status penerimaan bantuan sosial (bansos). Tidak semua yang berhenti menerima bansos otomatis dapat dikategorikan sebagai telah “graduasi” atau mandiri. Banyak di antara mereka yang berhenti menerima karena perubahan atau pembaruan data kesejahteraan sosial di Kemensos, serta hambatan administratif, seperti gagal burekol (buka rekening kolektif), masalah data kependudukan, atau kendala teknis di bank penyalur.

Oleh karena itu, untuk kelompok fakir miskin, capaian pada indikator ini lebih tepat diukur melalui peningkatan persentil atau peringkat kesejahteraan dalam Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (SIDAKSOS), bukan semata dari status penerima bansos.

Kenaikan ranking kesejahteraan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi, baik melalui peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, maupun berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial.

**d. Persentase Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (SPM)**

Seluruh indikator kelompok SPM (indikator 4–7) menunjukkan realisasi 100%, sesuai target. Capaian ini menandakan bahwa pelayanan dasar bidang sosial telah dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Faktor pendukung capaian 100% antara lain tersedianya mekanisme penyaluran bantuan sosial dan alat bantu bagi kelompok rentan, kolaborasi lintas perangkat daerah dan mitra sosial serta pendekatan jemput bola dan atau home visit dalam pelayanan sosial.

**e. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (SPM)**

Capaian kinerja 100% sesuai target, dimana hal ini menunjukkan kesiapan Dinas Sosial dalam respons cepat tanggap darurat melalui penyediaan logistik dan layanan sosial. Capaian ini juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan BPBD, instansi vertikal maupun organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan layanan pasca-bencana, termasuk rehabilitasi sosial dan pemulihan psikososial bagi korban.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait**

Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor sosial, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, di samping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Blitar sampai pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kinerja kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

Urusan Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai berikut:

- a) Kekuatan: Pengoptimalan serta mengingat akan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab setiap personil dalam pelaksanaan tugas memberikan hasil yang maksimal.
- b) Kelemahan: Kurangnya peningkatan kapasitas PSKS.
- c) Peluang: Pendataan PPKS dengan indikator yang terperinci mempermudah dalam penanganan PPKS melalui aplikasi SIDAKSOS dan banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PPKS.
- d) Tantangan: Menurunkan angka kemiskinan dalam kewenangan urusan sosial.

## **2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Sosial menghadapi beberapa hambatan utama, antara lain:

- a) Pendekatan perencanaan masih bersifat top-down, sehingga belum sepenuhnya berbasis hasil asesmen kebutuhan dan partisipasi masyarakat.
- b) Kualitas dan kelengkapan data masih menjadi tantangan, terutama belum seluruh data PPKS terpilah berdasarkan jenis disabilitas, usia, dan gender, yang menyulitkan penerapan kebijakan responsif gender dan inklusif.
- c) Masih adanya kelompok rentan yang belum memiliki administrasi kependudukan (Admuduk), yang menyebabkan terjadinya hambatan atau keterlambatan dalam mengakses layanan sosial.
- d) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang sosial, terutama tenaga pekerja sosial dan pendamping, yang berdampak pada efektivitas pendampingan kasus dan monitoring pasca penanganan.
- e) Ketergantungan terhadap alokasi bantuan pusat, yang membuat kesinambungan program di tingkat daerah kurang stabil apabila terjadi perubahan kebijakan nasional. Contohnya bantuan permakanan baik untuk lansia maupun penyandang disabilitas, yangmana jumlah penerima dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang tidak stabil.

## **3. Dampak terhadap Pencapaian Visi, Misi, SPM dan SDGs**

Pelayanan Dinas Sosial memiliki kontribusi langsung terhadap Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan. Selain itu, penyelenggaraan urusan sosial berperan penting dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, khususnya indikator pemenuhan kebutuhan dasar

bagi penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti serta pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota bagi korban bencana alam maupun sosial. Dari perspektif global, program Dinas Sosial juga berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama:

- a) SDG's Nomor 1 Tanpa Kemiskinan (mengentaskan kemiskinan ekstrim, mengurangi setengah proporsi penduduk miskin, menerapkan perlindungan yang tepat, menjamin masyarakat miskin memiliki hak yang sama, membangun ketahanan dan mengurangi kerentanan);
- b) SDG's Nomor 2 Tanpa Kelaparan (menghilangkan kelaparan dan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi);
- c) SDG's Nomor 5 Kesetaraan Gender (mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan menghapuskan praktik berbahaya bagi perempuan);
- d) SDG's Nomor 10 Berkurangnya Kesenjangan (memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial serta mengadopsi kebijakan upah dan perlindungan sosial).

#### **4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan**

Tantangan utama Dinas Sosial ke depan meliputi:

- a) Masih tingginya beban layanan sosial dibandingkan dengan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.
- b) Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial baru, termasuk disabilitas ganda, kemiskinan ekstrem, dan dinamika pascabencana.
- c) Keterbatasan fiskal daerah yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.
- d) Perubahan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk potensi munculnya PPKS baru akibat PHK, urbanisasi, dan migrasi kerja.
- e) Kendala data dan administrasi kependudukan yang memengaruhi validitas penerima manfaat.
- f) Kurangnya sarana penyimpanan dan logistik sosial khusus, seperti gudang bantuan dan fasilitas distribusi darurat.

Sementara itu, peluang penguatan pelayanan sosial terbuka luas, antara lain melalui:

- a) Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem data sosial, seperti optimalisasi SIKS-NG dan pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD) serta PPKS melalui Aplikasi Pemkab Blitar SIDAKSOS.

- b) Kolaborasi lintas sektor dan multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial masyarakat dalam memperluas jangkauan program sosial.
- c) Peningkatan kapasitas SDM sosial melalui pelatihan dan sertifikasi pekerja sosial profesional.
- d) Penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) melalui pelatihan kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan masyarakat.

## **5. Formulasi Isu-Isu Penting dan Rekomendasi Strategis**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan tahun mendatang antara lain:

- a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi dan belum seluruhnya terlayani.

Meskipun tren penurunan jumlah PPKS mulai terlihat, masih terdapat kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, fakir miskin, serta korban bencana yang belum sepenuhnya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial secara komprehensif dan berkelanjutan.

- b) Terbatasnya kapasitas, kompetensi, dan sarana pendukung bagi PSKS dan LKS dalam memberikan pelayanan sosial.

Baik dari segi jumlah maupun kemampuan teknis, pekerja sosial, pendamping sosial, serta relawan kesejahteraan sosial masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berjenjang, penguatan kelembagaan, dan penyediaan sarana pendukung yang memadai.

- c) Data kesejahteraan sosial belum real-time dan belum sepenuhnya menjadi dasar kebijakan.

Validasi dan verifikasi data masih lemah, sementara sistem informasi seperti Data Tungga Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Kemiskinan Daerah (DKD) yang dikelola melalui SIDAKSOS belum sepenuhnya dimutakhirkan secara rutin. Hal ini berdampak pada belum akuratnya sasaran penerima manfaat dan kurang efektifnya perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

- d) Masih adanya PPKS terlantar (anak, disabilitas, lansia, gepeng) yang belum tertangani secara komprehensif dan berkelanjutan

Anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta gelandangan dan pengemis masih dijumpai di luar jangkauan layanan sosial, akibat keterbatasan tenaga pendamping, asesmen kebutuhan yang belum menyeluruh, serta belum adanya intervensi lanjutan yang

berkelanjutan karena salah satu penyebabnya yaitu belum adanya Perda yang mengatur terkait pengananan PPKS di Kabupaten Blitar.

e) Terbatasnya sarana, prasarana, dan logistik pendukung kegiatan sosial dan kebencanaan.

Belum tersedia gudang/logistik khusus untuk penyimpanan peralatan Tagana dan dapur umum lapangan serta belum tersedia ruangan khusus untuk SDM kesejahteraan sosial atau PSKS.

f) Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan sosial di tingkat masyarakat, termasuk dalam pengelolaan Kampung Siaga Bencana (KSB).

Permasalahan bukan pada jumlah anggota KSB, tetapi pada belum optimalnya pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat masyarakat, sehingga kapasitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis komunitas belum berjalan maksimal.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan PD telah terakomodir di dalamnya.

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2025-2029 yaitu “KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”.

Dalam mendukung Misi Bupati Blitar, Dinas Sosial menjalankan misi kedua yaitu Misi II: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri.

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar maka pada tahun 2026 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2026 di mana di dalamnya terdapat 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Blitar	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,89%	5.086.411.213	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Blitar	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,89%	5.086.411.213	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Tepat Waktu dan sesuai Standar	100%	1.418.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	20 Dokumen	1.418.000	Indikator dan target kinerja kegiatan belum sesuai Dok. Renstra 2529
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Dokumen	709.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	609.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	11 Laporan	709.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	609.000	
	-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Walidata	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	100.000	Tambahan Subkeg

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Mandatory Hasil Desk Rankhir Renstra 2529
	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	100.000	Tambahan Subkeg Mandatory Hasil Desk Rankhir Renstra 2529
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.791.726.513	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.791.726.513	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji Dan Tunjangan	35 Orang/bulan	3.758.440.113	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.758.440.113	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.286.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	33.286.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikerjakan	100%	48.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikerjakan	100%	48.100.000	
	Pendidikan dan	Kab.	Jumlah Pegawai	26 Orang	20.000.000	Pendidikan dan	Kab.	Jumlah Pegawai	26 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Blitar	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Blitar	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	28.100.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	28.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.712.624	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	250.712.624	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Paket	50.638.297	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.638.297	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Paket	21.181.700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.181.700	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12.237.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.237.700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.247.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.247.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	118.447.927	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	118.447.927	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	39.960.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	39.960.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	50 Unit	228.588.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	50 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	50 Unit	228.588.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	50 Unit	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100%	499.385.876	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	100%	477.093.324	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.840.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	295 Laporan	3.840.000	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.254.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.254.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.290.976	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.290.976	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai Standar	100%	266.480.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 Unit	266.480.000	Indikator dan target kinerja kegiatan belum sesuai Dok. Renstra 2529
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	192.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	192.360.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 Unit	48.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	48.300.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.820.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.820.000	
	PROGRAM	Kab.	Persentase SDM	24,43%	697.488.000	PROGRAM	Kab.	Persentase SDM	24,43%	697.488.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Blitar	Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial			PEMBERDAYAAN SOSIAL	Blitar	Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial			
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	100 Orang	4.216.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	4.216.000	Indikator dan target kinerja kegiatan belum sesuai Dok. Renstra 2529
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	4.216.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	4.216.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	100%	693.272.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	100%	693.272.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	36 Lembaga	416.032.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	36 Lembaga	416.032.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Blitar	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota	3 Orang	4.800.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Blitar	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten/Kota	3 Orang	4.800.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	72 Orang	272.440.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	72 Orang	272.440.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	39,71%	905.719.300	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Blitar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	39,71%	1.063.947.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai Standar Teknis	100%	799.277.800	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai Standar Teknis	100%	799.277.800	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	86.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	86.000.000	
	Penyediaan sandang	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	965.000	Penyediaan sandang	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	965.000	
	Penyediaan alat bantu	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	158.174.800	Penyediaan alat bantu	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	158.174.800	
	Pemberian	Kab.	Jumlah Peserta	100 Orang	516.728.000	Pemberian	Kab.	Jumlah Peserta	100 Orang	516.728.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Blitar	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Blitar	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000	
	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	19.750.000	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	19.750.000	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai
	Pemberian layanan rujukan	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.970.000	Pemberian layanan rujukan	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.970.000	Target kinerja pada SIPD Renja belum sesuai
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	640.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	106.491.500	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	106.491.500	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Blitar	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	14.475.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Blitar	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	14.475.000	
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	30 Orang	5.850.000	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	30 Orang	5.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	56.166.500	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	56.166.500	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Blitar	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	78,07%	7.851.645.250	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Blitar	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	78,07%	7.851.645.250	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase DTKS, PBI-JK dan PPKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	7.851.645.250	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	7.851.645.250	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Kab. Blitar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000 Orang	325.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000 Orang	325.000.000	
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	541.769 Orang	7.481.645.250	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Blitar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	8.125 Orang	7.481.645.250	Target kinerja pada SIPD Renja belum sesuai
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Blitar	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Pemulihan Dalam Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%	220.949.200	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Blitar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten	100%	220.949.200	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Dltangani	100%	85.784.200	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	100%	85.784.200	
	Penyediaan Makanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang	75.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 Orang	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sandang	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	3.784.200	Penyediaan Sandang	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	3.784.200	
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4.000.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	4.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	3.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Blitar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	3.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana	548 Orang	135.165.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang Terbentuk	40%	135.165.000	Indikator dan target kegiatan di RKPD 2026 belum sesuai Dok. Renstra 2529

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ctt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Blitar	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kampung	31.825.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Blitar	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Kampung	31.825.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	103.340.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	103.340.000	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>14.762.212.963</b>					<b>14.762.212.963</b>	

Sumber: Dinas Sosial, 2025

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025.

Program / kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, Hibah, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Sosial. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan penyediaan alat bantu penyandang disabilitas serta fasilitasi batuan sosial.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
<i>HIBAH</i>						
1	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00	DPC Pertuni Kabupaten Blitar Yayasan Insan Madani Gerontologi Abiyoso LKSA Al-Khusyu' LKSA Miftahul Huda LKS Santa Theresia Badan Amil Zakat Kabupaten Blitar MCC LKSA Entrepeneur Muhammadiyah Kabupaten Blitar PPDI Tunas Abadi Kabupaten Blitar LKS Penyandang Disabilitas Mental Saman Al-Hadad LKS Roudlotul Aitam LKS Darul Hikmah LKS Darul Huda

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
<i>MUSRENBANG</i>						
1.	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Tapan RT 1 RW 5 Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 6.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna dan Karang Werdha berupa bimbingan teknis (20 orang)
2.	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dusun Udanawu RT 2 RW 2 Desa Karanggondang Kecamatan Udanawu Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 6.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna berupa bimbingan teknis (20 orang)
3.	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Wates Kecamatan Wates Kab. Blitar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM PSKS Karang Taruna berupa bimbingan teknis (50 orang)
4.	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan	Desa Purwokerto	Jumlah Lembaga	Rp 17.389.400,00	Peningkatan kapasitas

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
	Sosial	Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar	Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		SDM PSKS Karang Taruna berupa bimbingan teknis (1 unit)
5.	Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KSB Jolosutro Manunggal Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kab. Blitar	Jumlah Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana	Rp 10.125.000,00	Sosialisasi dan atau Peningkatan Kapasitas pada KSB (75 Orang)
6.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	RT 3 RW 3 Desa Jajar Kelurahan Talun Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 2.684.500,00	1 unit kursi roda (PENA INTAN)
7.			Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Rp 12.000.000,00	6 unit alat bantu dengar (PENA INTAN)

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
				Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis		
8.			Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 875.000,00	3 unit tongkat netra (PENA INTAN)
9.			Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 10.738.000,00	4 unit kursi roda (PENA INTAN)
10.			Dusun Krajan RT 2 RW 1 Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Rp 32.214.000,00	12 unit kursi roda (PENA INTAN)

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
				Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis		
11.			Dusun Krajan RT 2 RW 1 Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 4.792.000,00	5 unit walker/tongkat kaki tiga (PENA INTAN)
12.			Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 6.708.800,00	7 unit walker/tongkat kaki tiga (PENA INTAN)
13.			Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 25.000.000,00	1 unit kaki palsu (PENA INTAN)

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
14.			Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 350.000,00	1 unit kruk (PENA INTAN)
15.			Desa Jugo Kecamatan Kesamben Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 17.450.000,00	2 unit alat bantu dengar (PENA INTAN)
16.			Dusun Krajan Desa Kunir Kec. Wonodadi	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 5.369.000,00	2 unit alat bantu kursi roda (PENA INTAN)
17.			Desa Tugurejo Kec. Wates	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada	Rp 43.473.500,00	5 unit alat bantu dengar (PENA INTAN)

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Jenis Usulan
				Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis		
18.			Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kab. Blitar	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	Rp 958.400,00	1 alat bantu dengar (PENA INTAN)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar selaku Perangkat Daerah yang mengampu urusan sosial mengacu kepada kebijakan Kementerian Sosial RI dalam menentukan kebijakan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 visi Kementerian Sosial adalah “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yangmana selaras dengan visi Presiden RI yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang menekankan pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dari visi tersebut diharapkan Kementerian Sosial mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional ke- 4 dan 6 berdasarkan RPJMN 2025-2029 yaitu “memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas” serta “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2025-2029, dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Presiden 2025-2029. Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke 4 dan misi ke 6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Sasaran strategis dan indikator sasaran Renstra Kementerian Sosial RI periode 2025-2029 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1****Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra Kemensos RI 2025-2029**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang <i>Agile</i> , Berkualitas, dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Sementara itu, arah dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan rincian target pertumbuhan ekonomi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029), GNI per kapita 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029), kontribusi PDB maritim 8,1% (2025) dan 9,1% (2029), dan kontribusi PDB manufaktur 20,8% (2025) dan 21,9% (2029);
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dengan rincian target peringkat Global Power Index 33 di tahun 2025 dan 29 pada tahun 2029.
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan rincian target tingkat kemiskinan 4,5-5,0%, indeks rasio gini 0,372-0,375%, dan kontribusi PDRB KTI 22,4%;
4. Daya saing Sumber Daya Manusia meningkat, dengan rincian target Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56 (2025) dan 0,59 (2029); dan
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan rincian target penurunan intensitas emisi GRK 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Pada tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2026, tema prioritas pembangunan di tahun 2026 untuk Kabupaten Blitar adalah “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif”. Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2026 adalah:

1. Pemerataan Konektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian;

3. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UMKM dan Industri, serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Pengembangan Ekonomi;
4. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif; dan
5. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Blitar dalam RKPD Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2026 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
2. Penguatan layanan rehabilitasi sosial dasar secara komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor.
3. Peningkatan efektivitas perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penguatan basis Data Kemiskinan Daerah (DKD) dan integrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
5. Meningkatkan fasilitasi bantuan sosial kewirausahaan yang bersifat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
6. Meningkatkan penanganan dan pelayanan PPKS.

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 untuk Urusan Sosial mendukung prioritas pembangunan kabupaten ke-4 yaitu Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Renja mengacu pada tujuan sasaran yang tercantum dalam Rankhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

#### **1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Blitar yakni Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

#### **2. Sasaran**

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- b) Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

### 3. Indikator Kinerja, Sasaran, dan Target

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki indikator sasaran sebagai berikut:

- a) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya dengan target 4,30%.
- a) Nilai SAKIP dengan target 60,50.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Visi dan Mis Bupati Blitar, SDG's, Rankhir RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, dan Rankhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Secara keseluruhan Tahun 2026 Dinas Sosial melaksanakan 46 sub kegiatan yang tersebar pada 14 kegiatan dan 5 program. Rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Blitar	81%	5.086.411.213	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		83,29%	6.184.693.458,34
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	100%	1.549.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Dokumen	2.420.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	8 Dokumen	609.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	1.010.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	11 Laporan	609.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Laporan	1.105.000
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	1 Dokumen	100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Belum masuk dalam SIPD penganggaran Tahun 2026	1 Dokumen	155.000
1.06.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100 Data	100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Belum masuk dalam SIPD penganggaran Tahun 2026	100 Data	150.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan	Kab.	100%	3.791.726.513	DANA		100%	3.784.861.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Blitar			ALOKASI UMUM (DAU)			
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	35 Orang/bulan	3.758.440.113	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Orang/bulan	3.744.796.000
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	12 Dokumen	33.286.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	40.065.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dikerjakan	Kab. Blitar	100%	48.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	170.307.000
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	26 Orang	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Orang	54.672.000
1.06.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	40 Orang	28.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Orang	115.635.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	Kab. Blitar	100%	250.712.624	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	913.227.908
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Kab.	12 Paket	50.638.297	DANA		12 Paket	68.125.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Blitar			ALOKASI UMUM (DAU)			
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Paket	21.181.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	39.158.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Paket	12.237.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	22.234.550,34
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Blitar	12 Laporan	8.247.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	9.750.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	12 Laporan	118.447.927	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Laporan	705.045.358
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	5 dokumen	39.960.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	68.915.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Blitar	50 Unit	228.588.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	270.215.000
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	50 Unit	228.588.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	270.215.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	Kab. Blitar	100%	499.385.876	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Jasa	489.795.550
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	12 Laporan	3.840.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target di SIPD Renja belum sesuai	380 Laporan	5.045.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	75.254.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	74.500.550
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	420.290.976	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	410.250.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Kab. Blitar	100%	266.480.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		77 Unit	553.867.000
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	24 Unit	192.360.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Unit	255.742.000
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Blitar	50 Unit	48.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Unit	56.010.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kab. Blitar	1 Unit	25.820.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	242.115.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Kab. Blitar	100%	697.488.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24,21%	2.954.613.313
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Kab. Blitar	100 Orang	4.216.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator dan Target Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529	1 Rekomendasi	5.574.000
1.06.02.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Blitar	1 Dokumen	4.216.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.574.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	Kab. Blitar	100%	693.272.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	2.949.039.313
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	36 Lembaga	416.032.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		38 Lembaga	2.498.951.945

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.02.2.03.012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas dalam Penanganan Kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	3 Orang	4.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Orang	35.130.368
1.06.02.2.03.014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Blitar	72 Orang	272.440.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		72 Orang	414.957.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kab. Blitar	100%	905.719.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39,83%	1.920.328.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	100%	799.227.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529	100%	1.708.336.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	200 Orang	86.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Orang	194.855.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 Orang	965.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	11.370.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	50 Orang	158.174.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Orang	482.371.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	516.728.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	975.601.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	10 Orang	7.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Orang	10.425.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	19.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai	20 Orang	14.374.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.04.2.01.12	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	50 Orang	9.970.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai	20 Orang	11.240.000
1.06.04.2.01.14	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	5 orang	640.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 orang	8.100.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Kab. Blitar	100%	106.491.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529	4 Jenis Layanan	211.992.000
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	59.944.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Blitar	75 Orang	14.475.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	77.878.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	NAPZA	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.04.2.02.12	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 orang	5.850.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 orang	10.945.000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 Orang	56.166.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang	63.225.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Blitar	74,34%	7.851.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		78,09%	10.854.586.268,25
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Divalidasi dan Diverifikasi serta Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Blitar	100%	7.851.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	10.854.586.268,25
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Blitar	100.000 Orang	325.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		113.551 Orang	723.270.500,25
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Kab. Blitar	20 Orang	45.000.000	DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	166.660.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				(DAU)			
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	541.769 Orang	7.481.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI TEBKAU (CHT)	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai	8.125 Orang	9.964.655.768
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	100%	220.949.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	181.462.783,73
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani	Kab. Blitar	100%	85.784.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100%	87.617.784
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	1.000 Orang	75.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000 Orang	66.275.115.73
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	Kab. Blitar	100 Orang	3.784.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	8.408.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	4.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	9.041.250
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Orang	3.892.668
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Blitar	548 Orang	135.165.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529	40%	93.845.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	10 Kampung	31.825.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Kampung	3.575.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	Kab. Blitar	48 Orang	103.340.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Orang	90.270.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kabupaten/Kota							
<b>TOTAL</b>					<b>14.762.212.963</b>				<b>22.095.683.823,32</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Sosial Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada tahun 2026 terdapat kegiatan prioritas tambahan diantaranya yaitu Penyelenggaraan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI). Kedua kegiatan ceremonial ini menempel pada program Rehabilitasi Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selain kegiatan tersebut, juga ada kegiatan mandatory yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta kegiatan rutin atas program baru Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu “Rumah Latih”. Untuk operasional layanan anak disabilitas rumah terapi melalui program “Rumah Latih” yang bertempat di Shelter Garum tersebut diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kegiatan rutin lainnya yang menjadi program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu pendataan atau pemutakhiran data, yang fokusnya dilakukan dengan menysasar Anak Tidak Sekolah (ATS) kategori penyandang disabilitas dan anak terlantar serta pemutakhiran data kemiskinan. Pendataan tersebut dilakukan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada Tabel 3.2 pada BAB III. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 yang sudah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Rencana Kerja Tahun 2026 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan, dan 46 sub kegiatan beserta pemenuhan SPM di dalamnya. Berikut diuraikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial pada tahun 2026 yang dijabarkan pada tabel 4.1 serta target rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2026 yang diuraikan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan RKPD Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Blitar	81%	5.086.411.213	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target Indikator dalam RKPD belum sesuai dok. Renstra, target seharusnya yaitu 82,89%	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	100%	1.549.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target Indikator dalam RKPD belum sesuai dok. Renstra, target seharusnya yaitu 20 Dokumen	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	8 Dokumen	709.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penambahan 2 mandatory subkegiatan di Tahun 2026 namun belum masuk SIPD Renja, sehingga anggaran berkurang, rencana dianggarkan Rp.609.000	Dokumen Renstra, Renja, RKA, PPRG, KLA, Perkin, SPIP, Renaksi RB Tematik
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Blitar	11 Laporan	709.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penambahan 2 mandatory subkegiatan di Tahun 2026 namun belum masuk SIPD Renja, sehingga	Dokumen LKPI, LKJiP, LPPD, SPM, SAKIP, APIP, RB Tematik, Evaluasi RKPD Per Triwulan,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							anggaran berkurang, rencana dianggarkan Rp.609.000	SPIP, Evaluasi Data Sektoral, Ranham
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	1 Dokumen	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Belum masuk dalam SIPD penganggaran Tahun 2026, rencana dianggarkan Rp.100.000	
1.06.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100 Data	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Belum masuk dalam SIPD penganggaran Tahun 2026, rencana dianggarkan Rp.100.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100%	3.791.726.513	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	35 Orang/bulan	3.758.440.113	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	12 Dokumen	33.286.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100%	48.100.000	DANA ALOKASI		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		yang Dikerjakan				UMUM (DAU)		
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	26 Orang	20.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 orang ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait kompetensi manajerial
1.06.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Blitar	40 Orang	28.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 orang pegawai mengikuti bimtek terkait kompetensi teknik pelayanan sosial dasar
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah sesuai Standar	Kab. Blitar	100%	250.712.624	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Paket	50.638.297	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja ATK
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Paket	21.181.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja kebutuhan shelter dan perabot kantor
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Paket	12.237.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja cetak dan penggandaan
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Blitar	12 Laporan	8.247.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja mamin jamuan tamu
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	12 Laporan	118.447.927	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Rapat koordinasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	5 dokumen	39.960.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja jaspel kearsipan
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Kab. Blitar	50 Unit	228.588.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	50 Unit	228.588.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja sewa kendaraan, peralatan dan mesin kantor
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar	Kab. Blitar	100%	499.385.876	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target Indikator dalam RKPd belum sesuai dok. Renstra, target seharusnya yaitu 5 Jasa	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	12 Laporan	3.840.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target di SIPD Renja belum sesuai, seharusnya 295 Laporan	Belanja materai
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	75.254.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Biaya listrik, air dan telepon
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	420.290.976	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembayaran gaji non ASN, tenaga outsourcing (driver dan tenaga keamanan) serta jaminan kesehatan dan JKK Non ASN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Kab. Blitar	100%	266.480.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target Indikator dalam RKPD belum sesuai dok. Renstra, tarrget seharusnya yaitu 77 Unit	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	24 Unit	192.360.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target di SIPD Renja belum sesuai, seharusnya 26 Unit	Pembayaran pajak kendaraan R4 dan R2
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Blitar	50 Unit	48.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Biaya service AC dan komputer
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	1 Unit	25.820.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Biaya rehab gedung
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Kab. Blitar	100%	697.488.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target Indikator dalam RKPD belum sesuai dok. Renstra, tarrget seharusnya yaitu 24,43%	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Kab. Blitar	100 Orang	4.216.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator dan target indikator program di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Jumlah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan” dengan target 1 Rekomendasi	
1.06.02.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Blitar	1 Dokumen	4.216.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan UGB kepada perusahaan dan stakeholder terkait
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	Kab. Blitar	100%	693.272.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	36 Lembaga	416.032.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan bimtek karang taruna ( <b>musrenbang</b> ), sosialisasi kepada LKS terkait proses akreditasi, perpanjangan STP, pendaftaran LKS dan pemberian <b>hibah</b> kepada lembaga
1.06.02.2.03.012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Blitar	3 Orang	4.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		SDM LK3 yang mengikuti kegiatan peningkatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Keluarga (LK3)	yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi dalam Penanganan Kasus Kewenangan Kabupaten/Kota						kapasitas
1.06.02.2.03.014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Blitar	72 Orang	272.440.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Bimtek kepada PSM dan TKSK serta honor TKSK
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kab. Blitar	100%	905.719.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Target indikator program di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529, seharusnya 39,71%	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	Kab. Blitar	100%	799.227.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529 Bunyi indikator dan target indikator program di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai Standar Teknis”	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	200 Orang	86.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja sembako PPKS
1.06.04.2.01.02	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 Orang	965.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja sandang bagi PPKS (kaos dan handuk) #SPM
1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	50 Orang	158.174.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja alat bantu bagi 50 orang penyandang disabilitas (musrenbang) #SPM
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	516.728.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peringatan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN), Hari Disabilitas Internasional (HDI), penyusunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dokumen RAD penyangang disabilitas dan pelayanan program rumah latih bagi penyangang disabilitas serta pendampingan kepada klien untuk reintegrasi sosial <b>#SPM</b>
1.06.04.2.01.08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	10 Orang	7.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Bantuan advokasi pemenuhan hak dasar yang bersifat jangka panjang berupa akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar <b>#SPM</b>
1.06.04.2.01.10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	19.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan asesmen klien yang bersifat penanganan cepat sementara untuk kasus mendesak <b>#SPM</b>
1.06.04.2.01.12	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	50 Orang	9.970.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan layanan rujukan klien ke UPT terkait <b>#SPM</b>
1.06.04.2.01.14	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor	Kab. Blitar	5 orang	640.000	DANA ALOKASI		Pendampingan klien untuk

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				UMUM (DAU)		fasilitasi memperoleh dokumen kependudukan <b>#SPM</b>
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Kab. Blitar	100%	106.491.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Indikator Kegiatan di RKPD belum sesuai dengan Dok. Renstra 2529, seharusnya "Jumlah Pelayanan yang Diberikan kepada PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sesuai Standar Teknis" dengan target 4 Jenis Layanan	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja mamin untuk klien yang berada di shelter (maksimal 7-14 hari, 3x makan) <b>#SPM</b>
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blitar	75 Orang	14.475.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan pertemuan tatap muka dengan keluarga PPKS,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HIV/AIDS dan NAPZA	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						pendampingan (home visit) dalam rangka penguatan dukungan psikososial, arahan, motivasi dan penyelesaian masalah sosial, hingga keluarnya laporan kasus klien PPKS #SPM
1.06.04.2.02.12	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 orang	5.850.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Fasilitasi pemulangan dan pengembalian individu ke keluarga #SPM
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	30 Orang	56.166.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Kegiatan layanan rujukan klien PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ke UPT terkait
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Blitar	74,34%	7.851.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator dan target indikator program di RPKD belum sesuai dengan dok. Renstra,	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							seharusnya "Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial" dengan target 78,07%	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Divalidasi dan Diverifikasi serta Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Blitar	100%	7.851.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator program di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Persentase DTKS, PBI-JK dan PPKS yang Divalidasi Dan Diverifikasi"	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Blitar	100.000 Orang	325.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Bimtek aplikasi SIKS-NG dan aplikasi daerah SIDAKSOS kepada operator desa/kelurahan se-Kab Blitar, pemutakhiran data PPKS Kabupaten Blitar
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan	Kab. Blitar	20 Orang	45.000.000	DANA ALOKASI		Bantuan sosial modal usaha

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				UMUM (DAU)		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada PPKS yang memiliki embrio usaha
1.06.05.2.02.06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	541.769 Orang	7.481.645.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI TEMBAKAU (CHT)	Target kinerja di SIPD Renja belum sesuai, seharusnya 8.125 Orang	Rapat koordinasi, monev penyaluran bansos, BLT-DBHCHT, Iuran BPJS ketenagakerjaan (JKK dan JKM) untuk pekerja rentan dan miskin ekstrem serta belanja sembako untuk keluarga miskin dan rentan
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	100%	220.949.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Pemulihan dalam Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana"	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani	Kab. Blitar	100%	85.784.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator kegiatan di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota"	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	1.000 Orang	75.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Bantuan permakanan 3x1 hari untuk korban bencana alam dan sosial (DU dan mamin nasi kotak) #SPM
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	3.784.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Bantuan sandang untuk korban bencana alam dan sosial #SPM
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Kab. Blitar	100 Orang	4.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja kebutuhan untuk kelompok rentan (susu dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kabupaten/Kota						diapers) #SPM
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	100 Orang	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Belanja perlengkapan untuk layanan dukungan psikologis / fasilitasi trauma healing bagi korban bencana #SPM
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Blitar	548 Orang	135.165.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Bunyi indikator kegiatan di RKPD belum sesuai dengan dok. Renstra, seharusnya "Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) yang Terbentuk" dengan target 40%	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	10 Kampung	31.825.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Sosialisasi untuk KSB Desa Ringinrejo Kec. Wates (musrenbang) serta pembentukan KSB baru di wilayah Kec. Gandusari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Ctt	Output Spesifik
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	48 Orang	103.340.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Rapat koordinasi Tagana dan honor Tagana
<b>TOTAL</b>					<b>14.762.212.963</b>			

Tabel 4.2

## Rencana Pemenuhan SPM Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
<b>SPM SOSIAL</b>								
Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap tahun	-	Layanan Data dan Pengaduan	60 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	16 Orang	19.750.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	1.228 Orang	30.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	5 Orang	965.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	50 Orang	158.174.800	Dinas Sosial
				-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	10 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25 Orang	516.728.000	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	60 Orang	14.475.000	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Korban HIV/AIDS dan NAPZA				
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	7 Orang	640.000	Dinas Sosial
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20 Orang	7.000.000	Dinas Sosial
				-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	18 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14 Orang	5.850.000	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	14 Orang	9.970.000	Dinas Sosial
					<b>Jumlah Pagu</b>	<b>1.288 Orang</b>	<b>763.552.800</b>	
Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh	100%	Setiap tahun	-	Layanan Data dan Pengaduan	60 Orang	-	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Anak Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial di Luar Panti							
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	7 Orang	19.750.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	7 Orang	30.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	2 Orang	965.000	Dinas Sosial
				-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	3 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18 Orang	516.728.000	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	60 Orang	14.475.000	Dinas Sosial
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	2 Orang	640.000	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8 Orang	7.000.000	Dinas Sosial
				-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	6 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8 Orang	5.850.000	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	8 Orang	9.970.000	Dinas Sosial
					<b>Jumlah Pagu</b>	<b>60 Orang</b>	<b>605.378.000</b>	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap tahun	-	Layanan Data dan Pengaduan	20 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	11 Orang	19.750.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	2.761 Orang	30.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan	Penyediaan Sandang	3 Orang	965.000	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Sandang				
				Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	2 Orang	158.174.800	Dinas Sosial
				-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	8 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	14 Orang	516.728.000	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	20 Orang	14.475.000	Dinas Sosial
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	3 Orang	640.000	Dinas Sosial
				Pemberian Akses	Akses ke Layanan	10 Orang	7.000.000	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	10 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6 Orang	5.850.000	
				Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	15 Orang	9.970.000	Dinas Sosial
					<b>Jumlah Pagu</b>	<b>2.781 Orang</b>	<b>763.552.800</b>	
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100%	Setiap tahun	-	Layanan Data dan Pengaduan	60 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	26 Orang	19.750.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	20 Orang	30.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	2 Orang	965.000	Dinas Sosial
				-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	6 Orang	-	Dinas Sosial
				Pemberian	Pemberian	45 Orang	516.728.000	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	60 Orang	14.475.000	Dinas Sosial
				Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti Kepemilikan NIK	4 Orang	640.000	Dinas Sosial
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7 Orang	7.000.000	Dinas Sosial
				-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	30 Orang	-	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2026				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SPM	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25 Orang	5.850.000	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	35 Orang	9.970.000	Dinas Sosial
					<b>Jumlah Pagu</b>	<b>60 Orang</b>	<b>605.378.000</b>	
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan	1.000 Orang	75.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	100 Orang	3.784.200	Dinas Sosial
				-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100 Orang	-	Dinas Sosial
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100 Orang	4.000.000	Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	100 Orang	3.000.000	Dinas Sosial
					<b>Jumlah Pagu</b>	<b>1.000 Orang</b>	<b>85.784.200</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Sosial, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
2. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Rencana Kerja tahunan serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja tahun 2026 ini dititikberatkan pada Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif.
4. Untuk kegiatan yang bersumber dana selain APBD maka dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis pemanfaatan anggaran tersebut.

Rencana tindak lanjut dari Renja ini adalah semua pihak dan kelompok pemerhati (*stakeholders*) yang berkaitan dengan masalah sosial harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2026 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai pembangunan daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,

**Drs. MIKHAEL HANKAM INDORO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670929 199202 1 002

